



Kebon Sirih Dukung Penerbitan Pergub

SELURUH fraksi di DPRD DKI Jakarta diharapkan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk menerbitkan peraturan gubernur (pergub) terkait dengan penggunaan pagu anggaran 2014, yakni Rp 72 triliun untuk APBD 2015.

Tujuannya agar pelaksanaan pembangunan di Jakarta tetap berjalan lancar. "Kami berharap fraksi-fraksi di DPRD membiarkan Ahok menggunakan anggaran 2014. Karena pembangunan di DKI harus berjalan cepat," ujar Anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Muhammad Guntur, kemarin (22/3).

Menurut Guntur, memberikan jalan Ahok untuk menerbitkan pergub, berarti dewan mengutamakan kepentingan rakyat Jakarta yang saat ini menunggu hasil pembangunan. Adanya sejumlah fraksi yang belum menyetujui penggunaan pergub, seperti Fraksi Nasdem, PAN dan PKB, sangat disesalkan.

"Itu sama saja membiarkan terus-menerus terjadi kekisruhan seperti ini. Maka rakyat yang akan menjadi korban. Jadi ada baiknya kita memberikan kesempatan pada gubernur untuk mempercepat penggunaan anggaran," tandas Guntur.

Sikap ngotot sejumlah fraksi yang menolak penggunaan pergub oleh Ahok, dikawatirkan menjadi bumerang bagi DPRD DKI Jakarta. Dengan penggunaan APBD 2015, gubernur akan menyalahkan dewan, jika di tengah pelaksanaan anggaran terjadi masalah.

"Biarkan gubernur mengeluarkan pergub penggunaan anggaran 2014. Dengan begitu, dewan bisa memantau kinerja gubernur dan jajaran secara maksimal. Dari pada dewan memaksakan untuk mengeluarkan perda untuk penggunaan APBD 2015. Lebih utama lagi, dewan bisa mengawasi pelaksanaan lelang yang terjadi di DKI dan pengerjaan proyek mulai dari kedalaman aspal dan lainnya," kata dia.

Guntur menegaskan, pelaksanaan pagu anggaran 2014 tidak akan menghambat proses pembangunan. "Program yang ada dalam APBD 2014 dan 2015 itu

tidak ada perbedaan. Jumlahnya pun hanya terpaut Rp 1 triliun," beber dia.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik. "Dia (ahok) pernah ngomong di media, selama ia memimpin Jakarta, maka sampai 2017, dia mau menggunakan pagu anggaran APBD 2014 dalam menjalankan semua program kerjanya. Nah kami mempersilahkan kalau memang itu kemauannya," tutur politisi Partai Gerindra itu.

Menurut wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta itu, kini dewan tidak akan menghalang-halangi keinginan gubernur itu. "Karena kalau kami bersiteru terus kasihan dengan warga Jakarta. Pembangunan tidak jalan," kata dia.

Di tempat terpisah, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan, kesepakatan dewan untuk mendukung Gubernur Ahok menggunakan pagu anggaran 2014 sudah bisa dibuktikan ketika dewan batal menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pembahasan APBD hasil mendagri, Jumat (20/3) malam.

"Jelas sudah baik eksekutif maupun legislatif tidak pernah menyetujui APBD hasil evaluasi mendagri tersebut. Dengan demikian dewan mendukung Ahok untuk menggunakan pergub dalam menjalankan roda pemerintahannya yakni dengan menggunakan pagu anggaran 2014," beber Prabowo.

Prabowo berpendapat, Jakarta lebih baik menggunakan Pergub APBD 2014 untuk proses pembangunan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya anggaran siluman, seperti yang dimasukkan ke APBD 2015. Dengan pergub, dewan memberikan hak sepenuhnya kepada Gubernur Ahok untuk menyusun anggarannya sendiri berdasarkan pagu anggaran APBD DKI 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.

Tidak hanya itu, dengan disusunnya anggaran sepenuhnya oleh Basuki, maka tidak

ada lagi timbul kecurigaan di antara kedua belah pihak. Tidak ada lagi tuduhan dari Pemprov DKI Jakarta bahwa DPRD DKI memasukkan anggaran siluman ke dalam APBD DKI. "Otomatis anggaran siluman dari dewan kan nggak ada," tambah Prabowo.

Dia mengakui, menggunakan anggaran 2014 membuat sejumlah program tak dapat dilaksanakan. Seperti adanya perbaikan jalan dan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, penggunaan APBD 2014 untuk APBD 2015 tidak mempengaruhi perubahan anggaran yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Sebab peraturan yang berlaku masih sama, misalnya untuk kesehatan 10 persen dan gaji pegawai tidak boleh melebihi 30 persen.

"Kalau dulu Rp 10 triliun maka tahun ini harus sama, bukan gitu maksudnya. Boleh susun apa saja untuk belanja selama disetujui Kemdagri dan jumlah uangnya tidak melebihi APBD 2014," terang dia.

Menurut Ahok, selisih antara jumlah anggaran pada 2014 dengan yang diajukan pada 2015 hanya selisih 0,24 persen atau sekitar Rp 800 miliar. "Nanti kita pindahkan ke tempat lain, selama jumlahnya tidak melebihi dari anggaran 2014. Saya gampang saja, misalnya bebaskan tanah untuk embung, empang, kita comot Rp 800 miliar itu terus buang. Cepat kan," kata dia.

Mengomentari kondisi tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, seleainya perseteruan Pemprov DKI dan DPRD secara otomatis menyelesaikan target yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah ini, Kemendagri seharusnya bisa langsung mengesahkan APBD Provinsi DKI Jakarta. "Seharusnya bisa langsung mengesahkan, karena kalau nanti bolak balik lagi nanti nggak se-



lesai-selesai," tutur Refly.

Keputusan penggunaan pagu anggaran 2014, memudahkan Kemendagri untuk mengevaluasi. Sebab Kemendagri sudah memiliki evaluasi APBD 2014, sehingga tidak membutuhkan banyak waktu untuk mengesahkan APBD yang akan digunakan pada tahun ini. "Nggak ada masalah," ungkap dia.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasional Demokrat DPRD DKI Bestari Barus tetap menolak penggunaan Pergub untuk APBD 2015. Fraksinya mendorong digunakan peraturan daerah (perda). "Kami lebih memilih perda dari pada pergub," pungkas dia. (wok/pes)